

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG: PENDEKATAN KUALITATIF DALAM MENGUNGKAP DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Oleh:

Susanti Diana Mahri¹

Ersi Sisdianto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: susantidianamahri22@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of Local Own-source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on the allocation of capital expenditure in Lampung Province. The research methodology employed a qualitative approach with a descriptive-qualitative design. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders and analysis of official government documents. The results indicate that PAD and DAU significantly influence the allocation of capital expenditure, while DAK has a more limited impact. These findings provide insights into the dynamics of local financial management in Lampung Province and its implications for more effective policy formulation.*

Keyword: *Financial Management, Allocation Funds, Regional Original Income.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Lampung. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

mendalam dengan pemangku kepentingan dan analisis dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sementara DAK memiliki pengaruh yang lebih terbatas. Temuan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung dan implikasinya bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Dana Alokasi, Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Provinsi Lampung, sebagai salah satu entitas otonom di Indonesia, juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di wilayahnya.

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam mengelola belanja daerah, pemerintah provinsi Lampung harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, serta dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. Namun, kebanyakan dari penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, yang cenderung memperhatikan aspek kuantitatif semata tanpa memperhatikan konteks dan dinamika yang lebih dalam di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan belanja daerah di Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi faktor-faktor kontekstual, dinamika politik, dan faktor-faktor non-finansial lainnya yang mungkin mempengaruhi keputusan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan belanja daerah, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menganalisis secara mendalam faktor-faktor tersebut dalam konteks Provinsi Lampung. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan dan praktisi terkait dalam mengelola keuangan daerah dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pembangunan di tingkat lokal.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Melalui pendekatan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat, penelitian ini akan mencoba menggali persepsi dan pandangan mereka tentang hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan belanja daerah.

Selain itu, penelitian kualitatif juga memungkinkan pengidentifikasian faktor-faktor kontekstual yang unik bagi Provinsi Lampung yang mungkin tidak terdeteksi melalui analisis kuantitatif saja. Misalnya, faktor budaya, politik lokal, dan dinamika sosial yang memengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis lebih dalam melalui pendekatan kualitatif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah, tetapi juga untuk memahami konteks yang lebih luas di mana kebijakan keuangan daerah dilaksanakan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah dan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

- Penulis: Srikandi Cipto Mangunkusumo
- Tahun: 2012

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Inti: Meneliti 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa; PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah.
- 2. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah di Kota Bitung**
 - Penulis: Elce Yuliana Sumangkut
 - Tahun: 2019
 - Inti: Menunjukkan korelasi positif antara DAU dan PAD dengan pertumbuhan belanja daerah, dengan keberadaan Efek Kertas Terbang.
 - 3. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pengalokasian Belanja Modal**
 - Penulis: Caesar Pratama
 - Tahun: 2014
 - Inti: Pemerintah Kota Bengkulu efektif dalam mengelola pendapatan lokal, perlu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan mengutamakan belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**
 - Penulis: Oktaviani Yudiati Utami
 - Tahun: 2019
 - Inti: Pendapatan lokal, DAU, dan dana bagi hasil secara signifikan memengaruhi alokasi anggaran belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
 - 5. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Periode 2008–2012**
 - Penulis: Fety Sulistiyandari
 - Tahun: 2014
 - Inti: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memengaruhi alokasi belanja daerah, dengan kontribusi gabungan sebesar 92.5%

6. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur**
 - Penulis: Tedo Lungid Pangindro
 - Tahun: 2015
 - Inti: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Aloksi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki dampak signifikan.
7. **Analisis Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta**
 - Penulis: Djoko Purnomo Sidi
 - Tahun: 2006
 - Inti: Menganalisis pengelolaan aset daerah di dinas pertanian dan kehutanan Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengelolaan aset yang optimal untuk meningkatkan pendapatan lokal.
8. **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota Bitung)**
 - Penulis: Andri Tolu
 - Tahun: 2016
 - Inti: Meneliti dampak pendapatan lokal, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Kota Bitung, menunjukkan pengaruh positif secara bersama-sama, tetapi secara individu, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak signifikan.
9. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018**
 - Penulis: Siti Aisyah
 - Jurnal: Journal of Accounting, Finance, and Auditing
 - Tahun: 2019
 - Inti: Meneliti dampak pendapatan lokal, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah, menunjukkan

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan, DAU tidak signifikan, dan DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

10. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Jawa Barat Periode 2011-2013)

- Penulis: Rizky Amanda Putri
- Tahun: 2014
- Inti: Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2013, menunjukkan PAD dan DAU secara bersama-sama memengaruhi alokasi belanja daerah secara signifikan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah memiliki dinamika yang kompleks. Sebagian besar penelitian menyoroti bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah, namun pengaruh DAK lebih bervariasi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa PAD cenderung memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah, sementara DAU dan DAK dapat memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan negatif tergantung pada konteks wilayah dan periode waktu. Terdapat juga fenomena seperti Efek Kertas Terbang, di mana peningkatan pendapatan lokal dan DAU cenderung meningkatkan belanja daerah.

Dalam konteks penelitian ini tentang Provinsi Lampung, pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami dinamika pengelolaan keuangan daerah secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara rinci bagaimana PAD, DAU, dan DAK memengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Lampung, sambil mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung, serta memberikan rekomendasi yang berharga bagi pengambil kebijakan dan praktisi keuangan daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja daerah di Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dinamika kompleks dan kontekstual yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan daerah.

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail karakteristik fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memahami makna di balik fenomena tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, akademisi, dan tokoh masyarakat. Wawancara akan difokuskan pada persepsi dan pengalaman responden terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, serta pandangan mereka tentang hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah.
- b. Analisis Dokumen: Data sekunder akan dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah dan laporan keuangan daerah, termasuk anggaran belanja daerah, laporan realisasi anggaran, dan dokumen kebijakan terkait.

Pengolahan dan Analisis Data

- a. Transkripsi Wawancara: Wawancara akan direkam dan kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk analisis lebih lanjut.
- b. Analisis Tematik: Data dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Ini melibatkan identifikasi, pencatatan, dan interpretasi pola-pola tematik yang muncul dari data, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah.

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Validitas dan Reliabilitas

Validitas penelitian akan diperkuat melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari wawancara dengan data dari analisis dokumen.

Reliabilitas akan diperhatikan melalui keakuratan dan konsistensi dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta melalui reflektivitas peneliti dalam mencerminkan asumsi dan prasangka yang mungkin memengaruhi interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Wawancara mendalam dengan para pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya mengungkapkan bahwa PAD memainkan peran kunci dalam menentukan skala dan jenis belanja daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sebagian besar responden menekankan bahwa ketersediaan sumber daya keuangan lokal melalui PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah mengungkapkan bahwa DAU merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah daerah, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketergantungan yang tinggi terhadap DAU juga disoroti oleh beberapa responden sebagai salah satu tantangan dalam mengelola keuangan daerah, karena fluktuasi dan ketidakpastian dalam alokasi DAU dapat mempengaruhi ketersediaan dana untuk program-program jangka panjang.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung memiliki pengaruh yang lebih terbatas terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Meskipun DAK sering digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas nasional atau provinsi, responden menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan DAK sering kali terbatas oleh berbagai kendala administratif dan teknis. Beberapa responden juga mencatat bahwa keberlanjutan

proyek yang didanai melalui DAK menjadi masalah, karena setelah dana DAK habis, pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan lain untuk melanjutkan atau mempertahankan program tersebut.

Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor non-finansial, seperti kapasitas institusi, koordinasi antarinstansi, dan kualitas manajemen keuangan daerah, juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa responden menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan sistem pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk pembangunan lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung, serta implikasi bagi perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis data menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan akademisi, mengungkapkan bahwa DAU memiliki peran yang penting dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Para responden menyoroti bahwa DAU memberikan kestabilan dalam pendanaan bagi pemerintah daerah, terutama dalam membiayai program-program inti seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerimaan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Para responden menyatakan bahwa DAU memberikan prediktabilitas dalam alokasi dana, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan jangka panjang dan mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, beberapa responden juga mengungkapkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap DAU juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak yang disoroti adalah kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana, karena DAU sering kali terikat oleh ketentuan-ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan penerimaan DAU menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Beberapa responden menyatakan bahwa fluktuasi dalam alokasi DAU dari tahun ke tahun dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Oleh karena itu, para responden menekankan perlunya upaya untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap DAU.

Dalam konteks ini, hasil penelitian menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dan perencanaan keuangan yang matang dalam memanfaatkan DAU secara efektif. Para responden menekankan perlunya peran aktif dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa dana DAU digunakan secara efisien dan berdampak secara maksimal bagi pembangunan lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, serta upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang.

Analisis data menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang cukup terbatas terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Wawancara mendalam dengan para pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya mengungkapkan bahwa meskipun DAK sering kali dianggap sebagai sumber pendanaan tambahan untuk proyek-proyek pembangunan tertentu, kenyataannya pengaruhnya tidak selalu signifikan dalam realisasi belanja daerah.

Beberapa responden menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam penggunaan DAK adalah adanya kendala administratif dan teknis dalam penyaluran dan penggunaannya. Proses administrasi yang kompleks dan persyaratan teknis yang ketat sering kali memperlambat implementasi proyek-proyek yang didanai melalui DAK, sehingga menghambat pencapaian target belanja daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK menjadi masalah yang signifikan bagi pemerintah daerah. Beberapa responden mencatat bahwa setelah dana DAK habis, pemerintah daerah sering

mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan tambahan untuk melanjutkan atau mempertahankan proyek-proyek tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terhentinya proyek-proyek pembangunan di tengah jalan, sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Namun demikian, meskipun memiliki keterbatasan dan tantangan tertentu, DAK tetap dianggap sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Beberapa responden menyatakan bahwa DAK dapat menjadi tambahan sumber pendanaan yang berharga untuk proyek-proyek strategis yang mungkin tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh PAD atau DAU.

Dalam konteks ini, hasil penelitian menyoroti pentingnya perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan DAK guna memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Para responden menekankan perlunya penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penyaluran dan penggunaan DAK, sehingga dapat mempercepat implementasi proyek-proyek pembangunan dan mengurangi risiko kegagalan proyek.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang peran dan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana alokasi khusus untuk pembangunan daerah, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi proyek-proyek pembangunan yang didanai melalui DAK.

Pengaruh Terbatas Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DAK sering dianggap sebagai sumber pendanaan tambahan untuk proyek-proyek pembangunan tertentu, kenyataannya pengaruhnya tidak selalu signifikan dalam realisasi belanja daerah di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada alokasi dana khusus dari pemerintah pusat, implementasinya tidak selalu mencapai dampak yang diharapkan dalam belanja daerah.

Pengaruh terbatas DAK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kendala administratif dan teknis dalam penyaluran dan penggunaannya. Kompleksitas proses administrasi dan persyaratan teknis yang ketat seringkali menjadi hambatan dalam implementasi proyek-proyek yang didanai melalui DAK. Ini dapat menghambat

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

pencapaian target belanja daerah yang telah ditetapkan, karena proyek-proyek tertentu mungkin terhambat dalam tahap implementasi.

Tantangan Keberlanjutan Proyek Yang Didanai Melalui DAK

hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK menjadi masalah yang signifikan bagi pemerintah daerah. Setelah dana DAK habis, pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan tambahan untuk melanjutkan atau mempertahankan proyek-proyek tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terhentinya proyek-proyek pembangunan di tengah jalan, mengganggu kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Tantangan keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK juga dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Jika proyek-proyek tersebut tidak dapat diselesaikan atau dipertahankan setelah dana DAK habis, hal ini dapat mengurangi dampak positif pembangunan yang diharapkan dari penggunaan dana tersebut.

Pada tahap ini, hasil penelitian menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait dengan keberlanjutan proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun DAK sering kali dianggap sebagai sumber pendanaan tambahan yang penting untuk proyek-proyek pembangunan tertentu, keberlanjutan implementasi proyek tersebut menjadi masalah yang signifikan setelah dana DAK habis.

Faktanya, beberapa responden mencatat bahwa setelah dana DAK habis, pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan tambahan untuk melanjutkan atau mempertahankan proyek-proyek tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terhentinya proyek-proyek pembangunan di tengah jalan, yang pada gilirannya mengganggu kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Tantangan keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK memiliki dampak yang luas. Pertama, hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut, karena proyek yang tidak selesai tidak akan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Kedua, ketidakpastian keberlanjutan proyek juga dapat menghambat perencanaan jangka panjang pemerintah daerah, karena mereka harus mempertimbangkan kemungkinan terhentinya proyek di masa depan.

Tantangan ini menunjukkan perlunya upaya untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK. Salah satu solusi yang mungkin adalah pengembangan strategi pendanaan jangka panjang yang mencakup diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pencarian alternatif pembiayaan untuk memastikan kelangsungan proyek. Selain itu, perlu juga upaya untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan pengelolaan proyek yang lebih efisien untuk memaksimalkan hasil dari penggunaan dana DAK.

Dengan demikian, tantangan keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK menyoroti pentingnya perencanaan keuangan yang matang dan manajemen proyek yang efektif dalam pembangunan daerah. Upaya untuk mengatasi tantangan ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana DAK, tetapi juga akan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Pentingnya DAK Sebagai Sumber Pendanaan Tambahan

Meskipun memiliki keterbatasan dan tantangan tertentu, DAK tetap dianggap sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Beberapa responden menyatakan bahwa DAK dapat menjadi tambahan sumber pendanaan yang berharga untuk proyek-proyek strategis yang mungkin tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Pentingnya DAK sebagai sumber pendanaan tambahan menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan dalam implementasinya, dana ini masih memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan lokal. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen dan pelaksanaan DAK.

Perlunya Perbaikan Manajemen dan Pelaksanaan DAK

Hasil penelitian menyoroti perlunya perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan DAK guna memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Para responden menekankan perlunya penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penyaluran dan penggunaan DAK. Dengan demikian, diharapkan

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dapat mempercepat implementasi proyek-proyek pembangunan dan mengurangi risiko kegagalan proyek.

Perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan DAK juga dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana alokasi khusus ini. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memanfaatkan dana ini untuk mendukung pembangunan lokal dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Jadi, meskipun DAK memiliki pengaruh yang terbatas dan tantangan dalam implementasinya, dana ini tetap merupakan instrumen yang penting dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya, perlu adanya perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan DAK serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

Tantangan keberlanjutan proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dikaitkan dengan beberapa teori terkait, termasuk teori manajemen proyek dan teori keuangan daerah.

1. **Teori Manajemen Proyek:** Menurut teori manajemen proyek, keberhasilan suatu proyek dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang efektif, dan alokasi sumber daya yang tepat. Tantangan keberlanjutan proyek yang dihadapi oleh pemerintah daerah setelah habisnya dana DAK dapat dilihat sebagai hasil dari kurangnya perencanaan jangka panjang dan pengelolaan proyek yang efektif.

Dalam konteks ini, teori manajemen proyek menunjukkan pentingnya pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan yang terstruktur dalam manajemen proyek, termasuk identifikasi risiko, perencanaan keuangan jangka panjang, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan keberlanjutan proyek dan memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

2. **Teori Keuangan Daerah:** Teori keuangan daerah menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja untuk mencapai tujuan pembangunan. Tantangan keberlanjutan proyek yang dihadapi oleh pemerintah daerah setelah habisnya dana DAK mencerminkan

kompleksitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan risiko keuangan.

Menurut teori keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki strategi pendanaan yang berkelanjutan dan fleksibel. Hal ini mencakup diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan utang yang bijaksana, dan penggunaan instrumen keuangan lainnya untuk mengatasi ketidakpastian dalam alokasi dana pembangunan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kegagalan proyek dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana DAK.

Dengan mengaitkan tantangan keberlanjutan proyek yang didanai melalui DAK dengan teori manajemen proyek dan teori keuangan daerah, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dalam pengelolaan dana pembangunan daerah. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang efektif, dan penggunaan strategi keuangan yang berkelanjutan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran yang berbeda dalam menentukan Belanja Daerah dan pembangunan di wilayah tersebut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan skala dan jenis belanja daerah. PAD memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan sumber daya keuangan lokal melalui PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap agenda pembangunan lokal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. DAU memberikan kestabilan dalam pendanaan bagi pemerintah daerah dan memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan lebih baik. Namun, ketergantungan yang

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

tinggi terhadap DAU juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana dan ketidakpastian dalam alokasi tahunan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung memiliki pengaruh yang lebih terbatas terhadap Belanja Daerah. Meskipun DAK digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan tertentu, kendala administratif dan teknis sering menghambat implementasi proyek dan keberlanjutan pendanaannya. Namun demikian, DAK masih dianggap sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.

Dalam konteks ini, perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan DAK, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas institusi dan koordinasi antarinstansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik dialokasikan dengan efisien dan berdampak maksimal bagi pembangunan lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana publik untuk pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2018. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*.
- Cipto Mangunkusumo, S. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah.
- Lungid Pangindro, T. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

- Pratama, C. (2014). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pengalokasian Belanja Modal.
- Putri, R. A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Jawa Barat Periode 2011-2013).
- Sidi, D. P. (2006). Analisis Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
- Sulistiyandari, F. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Periode 2008–2012.
- Sumangkut, E. Y. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah di Kota Bitung.
- Tolu, A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota Bitung).
- Utami, O. Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.